

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
(STUDI EKSPLORATIF PADA DPRD KOTA BATU)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1) Pada

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh: Putri Alvi Santana

NPM: 15 04 22415

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2019

Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
(STUDI EKSPLORATIF PADA DPRD KOTA BATU TAHUN 2019)**

Disusun oleh:

Putri Alvi Santana

NPM: 15 04 22415

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing



Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Sc.

14 Oktober 2019

Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
(STUDI EKSPLORATIF PADA DPRD KOTA BATU)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Putri Alvi Santana

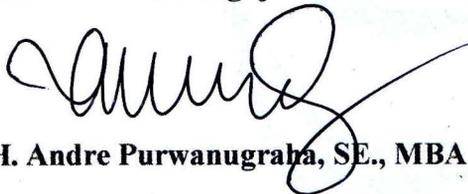
NPM : 15 04 22415

telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada tanggal 5 Desember 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk mencapai Derajat Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi

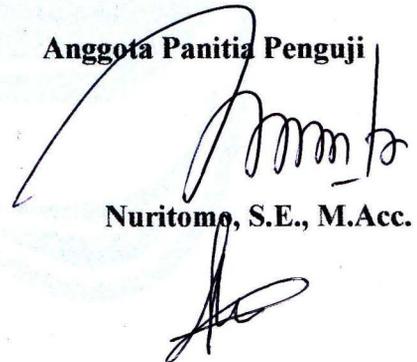
SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji



H. Andre Purwanugraha, SE., MBA

Anggota Panitia Penguji



Nuritomo, S.E., M.Acc.

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Sc.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
(STUDI EKSPLORATIF PADA DPRD KOTA BATU)**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka, apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi itu, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Yang menyatakan



Putri Alvi Santana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Partai Politik (Studi Eksploratif pada DPRD Kota Batu Tahun 2019)”, dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung melalui doa, semangat dan kasih. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang sudah membimbing dan menyertai dalam keadaan apapun.
2. Bapak Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, memberikan ide dan kesabaran untuk menyusun penelitian ini.
3. Anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024 yang telah menyediakan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen, karyawan dan *staff* FBE UAJY yang telah memberikan ilmu, tenaga, dan semangat selama ini.
5. Pak Budi Hartanto, Bu Tina, dan Arlodia Maharani, yang telah mendoakan, menyayangi dan memberi semangat.

6. Ando Wibowo Tarigan, S.T., terima kasih untuk cinta, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.
7. Keluarga Pengurus UKM KOPMA UAJY (Doni, Naning, Loren, Nadine, Denok, Vhika, dan Alfonsus), yang sudah menyemangati dan selalu ada di waktu aku gabut, halu dan bersemangat.
8. Keluarga Besar GKNF, *Filadelfia Youth Fellowship* (terlebih khusus untuk Febby Febiola, Septian Dwi Cahyono Nori, dan Jerit Binoko), Kelompok Pemuridan Manuella (terkhusus untuk Greis Dethan), Febe dan Ruth, yang sudah menjadi rumah kedua dan mendoakan.
9. Teman-teman KKN 75 Kelompok 61 (Inu, Yovan, Lauren, Tyas, Shinta, Nitta, Eka, Alim, Nando), Pedukuhan Pelem, beserta Pak Supri dan Bu Kitri, terima kasih untuk hiburan dan *support* kalian.
10. Melissa, Dessi, Aldo, yang sama-sama berjuang dari seminar hingga skripsi pun juga ASP, kita bisa menaklukkannya gaesss!!!!
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dan bermanfaat sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Terima kasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019
Penulis

Putri Alvi Santana

MOTTO

**“Now unto HIM that is able exceeding
abundantly above all that we ask or think,
according to the power that work in us, Unto
HIM be glory in the church by Christ Jesus
throughout all ages, world without end.**

Amen.” Ephesians 3:20-21

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Seluruh keluarga, kekasih, sahabat, dan setiap orang yang saya kasihi.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
(STUDI EKSPLORATIF PADA DPRD KOTA BATU)**

Disusun oleh:

Putri Alvi Santana

NPM 15 04 22415

Pembimbing

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Sc.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi partai politik dalam melaksanakan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai politik dan juga pengkajian faktor-faktor apa saja yang mendukung terselenggaranya praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai politik. Penulis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini mengacu pada Teori Struktur sasi Giddens' yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atau organisasi didasari oleh dukungan dari agen dan struktur sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan proses wawancara terhadap 6 informan dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya agen internal dan struktur sosial yang ada di organisasi partai politik mengarah pada perilaku formalitas. Adapun para anggota partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar mendapatkan rasa aman (*The Cultural Transmission Theory*) dan juga memiliki tuntutan untuk membesarkan partainya sehingga mengesampingkan nilai-nilai sosial yang ada (*Anomie Theories*). Sementara itu, publik tidak menjalankan kontrol sosialnya karena tidak memiliki kepedulian dan pengetahuan terhadap dana kampanye (*The Ecological Theory*).

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, dana kampanye, partai politik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
4.1.1. Manfaat Praktis	6
4.1.2. Manfaat Teoritis.....	7

1.5.	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....		9
2.1.	Teori Strukturasi Giddens.....	9
2.2.	The Ecological Theory.....	10
2.3.	The Cultural Transmission Theory.....	11
2.4.	Anomie Theories.....	11
2.5.	Akuntabilitas.....	12
2.6.	Transparansi.....	14
2.7.	Pengertian Partai Politik.....	16
2.8.	Pemilihan Umum.....	18
2.8.1.	Kampanye.....	19
2.8.2.	Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilihan Umum.....	20
2.9.	Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III.....		29
3.1.	Jenis Penelitian.....	29
3.2.	Objek dan Lokasi Penelitian.....	29
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	31

3.5. Metode Pengambilan Sampel	31
3.6. Pengembangan Instrumen.....	33
3.7. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV	38
4.1. Reduksi Data.....	38
4.2. Data Display.....	42
4.3. Pembahasan.....	50
BAB V.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	56
5.3. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Parpol yang Menyerahkan LADK dan LPSDK ke KPU.....	3
Gambar 2. Skema Penerimaan LADK.....	23
Gambar 3. Skema Penerimaan LPSDK.....	24
Gambar 4. Skema Penerimaan LPPDK.....	25
Gambar 5. Strukturasi Modalitas Giddens	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Informan.....	32
Tabel 2. Pengembangan Instrumen Wawancara.....	34
Tabel 3 Kebijakan Dana Kampanye	38
Tabel 4. Pentingnya Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye..	39
Tabel 5. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Dana Kampanye.....	40
Tabel 6. Peran Agen yang Mendukung Terciptanya Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan menjadi ciri utamanya. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat ditandai dengan kegiatan Pemilihan Umum baik (Pemilu) untuk lembaga Eksekutif dan Legistatif (UU 7/2017). Sebelum memasuki Pemilu, para kader yang diusung yang dari berbagai partai politik melakukan kegiatan kampanye sebagai usaha peningkatan elektabilitas. Salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik adalah melakukan debat publik. Bidwell (2015) menemukan bukti dampak positif yang kuat bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, para kader yang terpilih akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada masa awal jabatan. Tentu saja, kegiatan tersebut membutuhkan dana yang besar. Savenco (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu merupakan aspek yang penting dalam reformasi pemilu karena tanpa dana yang memadai, peluang kader untuk memenangkan pemilu akan berkurang secara drastis. Peran kampanye begitu penting karena dapat menarik dan meyakinkan konstituen, dimana kampanye yang lebih massif dan intensif dilakukan, semakin besar dana kampanye yang dibutuhkan (Putra, 2018). Indra J. Piliang (2011) dalam artikel kebumenkab.go.id menyatakan bahwa sejumlah penelitian mengenai pemilu, penggunaan uang untuk mengadakan pertemuan, makan bersama dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan.

Di sisi lain, pendanaan kampanye partai politik sangat menarik karena kurangnya transparansi yang biasanya mengelilingi proses ini dapat mengarah pada fenomena berbahaya, yaitu korupsi (Savenco, 2015). Ketika kampanye membutuhkan dana besar, yang akan menjadi masalah adalah keabsahan sumber dana yang dikumpulkan (Putra, 2018). Giddens (1984) menjelaskan dalam teori strukturalisasi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh peran agen dan juga struktur sosial. Prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat terwujud dengan adanya aturan dan sanksi bagi peserta pemilu, serta diperlukan juga lembaga untuk mengawasi laporan keuangan partai (Pinilih, 2017). Peran agen yang seharusnya dapat mendukung terselenggaranya kampanye yang akuntabel dan transparan dari sisi keuangan selain dari partai itu sendiri adalah Komisi Penyelenggara Pemilu. Salah satu bukti bahwa KPU berusaha mendorong terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan transparan adalah dengan membuat aturan kegiatan kampanye yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu dengan melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Penetapan regulasi baru ini dinilai akan merepotkan partai politik yang bersangkutan (radarmalang.id, 2018). Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi yang tinggi perihal pengungkapan identitas penyumbang yang harus dicantumkan dalam setiap laporan dana kampanye. Menurut PKPU RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, pasal 4 menyebutkan bahwa penerimaan dan pengeluaran kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU membuat Aplikasi Dana Kampanye yang diharapkan dapat menjadi control peserta pemilu dalam mengelola dana kampanye (kpu-kotabtu.go.id). Di Kota Batu, transparansi dan akuntabilitas pada organisasi partai politik juga masih belum terlaksana dengan baik (Kotabatu.bawaslu.go.id). Pada akhir September 2018 lalu, parpol yang akan berjuang di Pemilu tahun ini mulai menyampaikan LADK dan menyerahkan jumlah calon anggota DPRD.

Gambar 1.1. Jumlah Parpol yang menyerahkan LADK dan LPSDK ke KPU



Gambar diatas merupakan jumlah parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Laporan ini menimbulkan kejanggalan karena LPSDK dari 9 Parpol (ditunjukkan dengan grafik warna kuning) masih bernilai 0 atau nihil padahal kegiatan kampanye sudah berlangsung sejak akhir tahun 2018. Partai yang menyerahkan LADK dan LPSDK bernilai nihil antara lain Partai Gerindra, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Berkarya, PKS, PPP, Partai Demokrat PBB dan PKP. Bawaslu juga mempertanyakan transparansi dari 9 partai yang LPSDK-nya masih nihil karena dinilai tidak masuk akal. Sementara itu 2

parpol lagi juga belum melaporkan LADK dan LPSDK yaitu Partai Garuda dan Partai Hanura (Ditunjukkan dengan grafik warna merah). Namun 16 parpol ini resmi terdaftar menjadi peserta pemilu 2019. Padahal PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pasal 67 menjelaskan bahwa Partai Politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan LADK ke KPU dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan.

Fakta yang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini ialah politik uang yang masih sangat kental dan melekat pada masyarakat Kota Batu. Sebuah penelitian kuantitatif survey yang dilakukan oleh Bawaslu menyatakan bahwa 27% dari 144 responden warga Kota Batu mengakui pernah menerima dan akan menerima politik uang jika ada peluang. Yang lebih menyedihkan adalah 62% responden yang mengetahui atau menerima politik uang tidak akan melaporkan uang tersebut hal itu berarti politik uang masih diinginkan dalam Pemilu tahun 2019. Politik uang tidak dibenarkan dalam meraih sukses dalam dunia politik meskipun pada kenyataan di lapangan banyak menunjukkan bahwa caleg yang melakukan politik uang tidaklah sedikit (Weda, 2014). Rendahnya pengungkapan identitas penyumbang juga dapat meningkatkan praktik politik uang yang ada di kalangan masyarakat (Muhtadi, 2013).

Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam kegiatan kampanye merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Namun, tidak sedikit pihak partai politik yang ingin menolak melakukan praktik akuntabilitas dan transparansi. Sebuah survey yang dilakukan Alexander (2011) pada kelompok warga negara independen di Kanada menunjukkan bahwa, 61% responden tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik

karena adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Biaya yang sulit untuk diungkap tersebut biasanya terjadi ketika melakukan kegiatan terselubung untuk meningkatkan elektabilitas partai. Pengungkapan biaya-biaya kampanye secara akuntabel dan transparan dirasa menghambat karena dapat mengindikasikan kecurangan selama proses kampanye.

Berdasarkan uraian diatas, kampanye meningkatkan keterlibatan konstituen dalam kegiatan demokrasi dan tidak sedikit dana yang dikeluarkan dalam kegiatan kampanye yang bertujuan menggaet suara masyarakat. Menariknya, transparansi dana kampanye masih rendah dan hal ini menimbulkan permasalahan di masa mendatang yaitu tindak pidana korupsi meskipun akuntabilitas dari parlemen yang terpilih akan meningkat di tahun pertama pemenang pemilu bertugas (Bidwell, 2015). Di sisi lain, pelaporan wajib yang harus dilaksanakan sebagai peserta pemilu menurunkan partisipasi masyarakat untuk berpolitik karena diyakini bahwa ada kemungkinan biaya tak berwujud namun dalam nominal besar yang sulit untuk diungkapkan (Couture, 2011). Partai politik yang menjadi peserta pemilu hanya memperhatikan persyaratan tertulis agar dapat menjadi peserta pemilu dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan keterbukaan pada masyarakat. Peranan pihak inti dan juga struktur sosial yang ada di partai politik juga mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. (Giddens 1984). Di sisi lain, praktik akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan dengan baik akan memberikan nilai positif bagi kegiatan politik di Indonesia. Karena itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan juga menghambat praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye.

1.2. Rumusan Masalah

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye masih belum terlaksana dengan baik. Dari 16 parpol peserta pemilu, 9 diantaranya mengumpulkan LADK dan LPSDK bernilai nihil padahal kegiatan kampanye sudah mulai dijalankan, 2 parpol lagi tidak mengumpulkan LADK dan LPSDK, sisanya mengumpulkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai politik dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai politik.

1.4. Manfaat Penelitian

4.1.1. Manfaat Praktis

Sebagai evaluasi bagi setiap partai politik bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik juga berperan penting dalam mewujudkan kegiatan politik yang berkualitas di masa mendatang.

4.1.2. Manfaat Teoritis

Sebagai pengetahuan bagi peneliti bagaimana praktik lapangan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan pada penelitian yaitu Teori Strukturasi Giddens, *The Ecological Theory*, *The Cultural Teori*, *Anomie Theories*, Akuntabilitas, Transparansi, Pengertian Partai Politik, Pemilihan Umum, Kampanye, Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilihan Umum dan Penelitian Terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, pengembangan instrument, dan metode analisis data.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari permasalahan apa yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik. Bab V

Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai politik dan juga untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai politik. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Alexander (2011), Fellay (2013) dan Savenco (2015) menyatakan bahwa kegiatan kampanye membutuhkan dana yang besar, adanya persyaratan melakukan akuntabilitas dan transparansi dapat menghambat kegiatan kampanye karena terdapat biaya-biaya yang tidak bisa diungkap karena ada indikasi kecurangan dalam kampanye. Bila tidak diungkap secara menyeluruh akan mengarah kepada praktik korupsi oleh anggota partai politik.

Kesimpulan pada penelitian berdasarkan teori strukturasi giddens adalah peran agen internal yang lemah dalam hal ini adalah Ketua Umum partai tidak menginstruksikan anggotanya untuk akuntabel dan transparan sehingga hal dikembalikan kepada masing-masing pengurus partai di setiap tingkatan (*Legitimation*). Selain itu, partai politik juga memiliki hak untuk melaporkan seluruh dana kampanye atau tidak dikarenakan dana kampanye tersebut bersumber dari pribadi yang mencalonkan (*domination*). Partai politik bersikap akuntabel untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku (*Signification*). Adapun para anggota

partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar mendapatkan rasa aman (*The Cultural Transmission Theory*) dan juga memiliki tuntutan untuk membesarkan partainya sehingga mengesampingkan nilai-nilai sosial yang ada (*Anomie Theories*). Lemahnya agen internal dan struktur sosial yang ada di organisasi partai politik mengarah pada perilaku formalitas. Sementara itu, publik tidak menjalankan kontrol sosialnya karena tidak memiliki kepedulian dan pengetahuan terhadap dana kampanye (*The Ecological Theory*).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dibawah ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini.

- Penelitian eksploratif menuntut kerjasama dengan informan agak dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan peneliti. Informan tidak cukup terbuka dalam memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diajukan.
- Adanya potensi bias penelitian dikarenakan narasumber memiliki perbedaan aturan kebijakan dana kampanye.

5.3. Saran

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

- Untuk proses wawancara pada penelitian eksploratif selanjutnya memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menggali informasi. Diharapkan peneliti dapat menentukan waktu yang tepat agar informan tidak terburu-buru dan tidak mengganggu aktivitas informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidwell, K., K. Casey dan R. Glennerster. 2015. *The Impact of Voter Knowledge Initiatives in Sierra Leone*. Working Papers (Faculty) Stanford Graduate School of Business. P1-A21. 62p.
- Belkaoui R., Ahmed Picur, Ronald D. 2000. *Understanding Fraud in the Accounting Environment*. Managerial Finance. (26:11), pp 33
- Busco, C. 2009. *Giddens' Structuration Theory and Its Implications for Management Accounting Research*. Springer Science+Business Media.
- Couture Gagnon, A. dan Filip Palda. 2011. *The Price of Transparency* 16/05/2019 *Do Campaign Finance Disclosure Laws Discourage Political Participation by Citizens' Groups?*. Public Choice. (146:3/4), pp 353-374.
- Dwi, A. 2018. *Dana Kampanye Bisa Repotkan Parpol*. Diakses 8 Juli 2019 pada website Radar Malang pada <https://radarmalang.id/dana-kampanye-bisa-repotkan-parpol/>
- D. Shapiro and Arthur Zillante. (2017). *Contribution Limits and Transparency in a Campaign Finance Experiment*. Southern Economic Journal. (84:1) pp 98-119.
- Englund, H. and Gerdin, J. (2008), "Structuration theory and mediating concepts: pitfalls and implications for management accounting research", *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 19 No. 8, pp. 1122-1134.
- Fang, H. Shapiro, D. and Arthur Z. (2016). *An Experimental Study of Alternative Campaign Finance Systems: Transparency, Donations and Policy Choices*. Economic Inquiry, (54:1) pp 465-507)
- Fellay, S. 2013. *The Future of Campaign Finance*. Harvard International Review. Pp 45-47
- Giddens, A. (1979), *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradictions in Social Analysis*, Macmillan Press, London.
- Giddens, A. (1984), *The Constitution of Society*, Polity Press, Cambridge, MA.
- Giddens, A. and Pierson, C. (1998), *Conversations with Anthony Giddens*, Polity Press, Cambridge, MA.
- Hariyanto. 2015. *Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih*. Diakses 17 Juni 2019 dari website Pemkab Kebumen pada <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/89>

- [Jack, L.](#) and [Kholeif, A.](#) (2007), "Introducing strong structuration theory for Informing qualitative case studies in organization, management and Accounting research", [Qualitative Research in Organizations and Management](#), Vol. 2 No. 3, pp. 208-225.
- Karsten, H. and Jones, M. (2003), "Review: Structuration Theory and Information Systems Research", Research Papers in Management Studies. Judge Institute of Management Cambridge's business school.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- KPU Kota Batu: Admin KPU Kota Batu. 2018. *Ini Lho!! Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019*. Diakses 13 April 2019 dari website KPU pada <https://kpukotabatu.go.id/inilho-laporan-awal-dana-kampanye-peserta-pemilu-2019/>
- KPU Kota Batu: Admin KPU Kota Batu, 2018. *Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 Sebagai Kontrol Bagi Peserta Pemilu*. Diakses 7 Maret 2019 dari website KPU pada <https://kpu-kotabatu.go.id/aplikasi-pelaporan-dana-kampanye-pemilu-2019-sebagai-kontrol-bagi-peserta-pemilu/>
- Lamsal, M. 2012. *The Structuration Approach of Anthony Giddens*. Himalayan Journal of Sociology and Antropology. Vol. 5. Pp 111-122.
- Loyal, S. 2003. *The Sociology of Anthony Giddens*. England: Pluto Press.
- MD, I. U. (2005). *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press.
- Muhtadi, B. 2013. *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron Klien*. Diakses 10 Maret 2019 dari website LIPI pada <https://ejournal/politik.lipi.go.id>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Pinilih, A. 2017. *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pngaturan Keuangan Partai Politik*. Mimbar Hukum. (29:1) pp 69-81

- Putra, H. 2018. *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. (6:2) pp 112-119.
- Roberts, J. and Scapens, R.W. (1985), “*Accounting systems and systems of accounting: understanding accounting practices in their organizational contexts*”, *Accounting, Organizations and Society* , Vol. 10 No. 4, pp. 443-456.
- Rooseno. 2014. *Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan artai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- RRI: Octavia Hanum. 2019. *Survei Bawaslu, Warga Kota Batu Masih Permisif dengan Money Politic*. Diakses (12 Maret 2019) dari Harian RRI pada, http://rri.co.id/post/berita/655832/pemilu_2019/survei_bawaslu_warga_kota_batu_masi_permisif_dengan_money_politic.html
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Savenco, I. G., 2015. *Political Party Funding in Romania - One Step Forward, Two Steps Back?* EIRP Proceedings. (10:1) pp 735-741.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simarmata, M. (2018). *Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*. Jurnal Legislasi Indonesia. (15:01) pp 21-36.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitiab Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tribun Jatim: Putri Sany Eka. 2019. *Bawaslu Kota Batu Curigai Partai yang Laporkan Dana Kampanye Nol Rupiah*. Diakses (21 Maret 2019) dari Harian Tribun Jatim pada <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/13/bawaslu-kota-batu-curigai-partai-yanglaporkan-dana-kampanye-nol-rupiah?page=2>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik